

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dikemukakan bahwa pada hakekatnya tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4: "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diamanahkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) di atas, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah memegang peranan yang sangat strategis dan penting. Karenanya diperlukan pengelolaan yang mantap dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah pada dasarnya mencakup kegiatan-kegiatan: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pembinaan (Engkoswara, 1987; Dachnel Kamars, 1985).

Ketiga kegiatan ini merupakan fungsi pokok Administrasi Pendidikan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah.

Administrasi Pendidikan mencakup penataan sumberdaya yang mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, yaitu: manusia (personil), sumber belajar (kurikulum), dan fasilitas. Administrasi Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu media atau alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dan pembinaan merupakan salah satu fungsi Administrasi Pendidikan, bertujuan untuk menjaga dan mendorong agar pelaksanaan proses belajar-mengajar (PBM) di sekolah dapat berjalan lancar, berhasil guna, dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depdikbud, 1987). Fungsi pengawasan dan pembinaan mengandung unsur bimbingan yang dapat dimaknai sebagai supervisi. Karena itu, bertolak dari tujuan pengawasan ini, maka dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, khususnya kegiatan proses belajar-mengajar (PBM) di sekolah, pihak-pihak yang diberi wewenang melakukan pengawasan dan pembinaan harus lebih menitikberatkan kepada personil sekolah, terutama kepada guru, sebagai pelaksana langsung proses belajar-mengajar tersebut.

Rendahnya kualitas hasil belajar siswa pada semua jenjang persekolahan yang banyak disoroti sejak beberapa tahun terakhir ini, merupakan tantangan dan masalah yang dihadapkan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan di sekolah, terutama guru sebagai pelaksana proses belajar-mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan guru dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar sangat strategis dan penting.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Achmad Sanusi (1990) mengemukakan "... secara jujur dapat diketengahkan bahwa persepsi umum dari para guru/dosen pada pekerjaan atau 'profesinya' dan tugas-tugasnya menunjukkan suatu gambaran yang sedang mengalami perubahan mendalam". Lebih lanjut dikemukakannya: "Meskipun saya sendiri merasa sangat prihatin dan menyesal, namun tergambar bahwa persepsinya itu tidak mapan, tidak jelas, kurang ajeg dan utuh" (Achmad Sanusi, 1990).

Kalau persepsi guru terhadap tugasnya tidak mapan dan tidak jelas sebagaimana yang disinyalir ungkapan di atas, maka dengan sendirinya kemampuan profesionalnya diragukan dan tidak akan mungkin dapat melaksanakan tugas mengajar secara maksimal sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam kurikulum dan pedoman pelaksanaan administrasi sekolah. Kenyataan ini merupakan tantangan yang dihadapkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan guru sebagai pelaksana langsung proses belajar-mengajar di sekolah.

Pembinaan personil (guru) termasuk kegiatan administrasi personil yang merupakan salah satu fungsi Administrasi Pendidikan (Castetter, 1981). Pihak yang seharusnya berperanan dalam pembinaan guru dalam mengajar atau melaksanakan fungsi supervisi pengajaran adalah penilik sekolah dan kepala sekolah. Sekarang yang

menjadi persoalan ialah apakah supervisi pengajaran atau pembinaan profesional guru tersebut telah dilaksanakan secara efektif oleh penilik sekolah dan kepala sekolah? Jawaban pertanyaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman atau persepsi penilik sekolah dan kepala sekolah tentang hakekat dan fungsi supervisi pengajaran itu sendiri. Sebab tanpa pemahaman dan persepsi yang jelas tentang hakekat dan fungsi supervisi pengajaran oleh mereka, mustahil dapat melaksanakan supervisi pengajaran secara efektif.

Supervisi pengajaran yang merupakan salah satu fungsi pengawasan yang sangat khusus (Oteng Sutisna, 1987) merupakan layanan dan bantuan yang diberikan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara lebih baik (Wiles, 1956). Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa peranan atau fungsi supervisi pengajaran ialah "mendukung, membantu, dan bukan menyuruh" (Oteng Sutisna, 1987). Selanjutnya beliau mengutip ungkapan Wiles yang mengatakan bahwa "... supervisi yang baik hendaknya mengembangkan kepemimpinan di dalam kelompok, membangun program latihan dalam jabatan untuk meningkatkan keterampilan guru, atau membantu guru meningkatkan kemampuannya menilai hasil pekerjaannya" (Oteng Sutisna, 1987).

Berdasarkan pengalaman penulis yang diperoleh selama membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa IKIP Ujung Pandang beberapa periode di beberapa kecamatan dan desa di Sulawesi Selatan dari tahun 1980 sampai dengan 1988, dapat diidentifikasi beberapa masalah umum yang dihadapi guru sekolah dasar dalam

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, antara lain:

1. Pada musim turun sawah dan musim panen, tingkat ketidakhadiran (absen siswa di sekolah sangat tinggi, karena sebagian besar dari mereka membantu orangtuanya menggarap sawah atau memanen hasilnya.
2. Pendapatan (gaji) guru yang belum mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga banyak di antara mereka mencari pekerjaan sampingan, seperti: bertani, berdagang, dan sebagainya. Hal ini juga menyebabkan mereka tidak dapat mengkonsentrasikan pikiran dan perhatiannya secara penuh kepada pekerjaan pokoknya sebagai pengajar di sekolah.
3. Pendidikan persiapan guru yang kurang baik dan pelatihan dalam jabatan yang tidak memadai.
4. Kurangnya sarana belajar yang dapat digunakan oleh guru untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya, seperti: perpustakaan, latihan, pertemuan-pertemuan profesional, dan sebagainya.

Masalah-masalah umum yang dihadapi guru tersebut cukup berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang dilakukannya di sekolah. Tidak dapat disangkal bahwa lemahnya kualitas guru dalam mengajar sebagaimana tercermin dalam ungkapan Achmad Sanusi di muka, berlarut-larut belum memperoleh penanganan dan penyelesaian secara efektif dan menyeluruh, terutama guru-guru sekolah dasar yang bertugas dan mengabdikan diri di pelosok dan pedalaman terpencil. Keadaan ini tentunya mempengaruhi kualitas atau mutu

sekolah tempat guru-guru yang dimaksud itu mengajar. Sebab kualitas sekolah sangat ditentukan oleh kualitas personil pengelolanya, terutama personil gurunya. Beeby (1966) menekankan bahwa kualitas sekolah yang ideal dan diharapkan adalah kualitas yang berada pada tahap "meaning" yang sangat menekankan pada aspek kebermaknaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Untuk mencapai tahap ini diperlukan guru-guru yang berkualitas dan berkemampuan profesional yang tinggi. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan yang baik dan efektif.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dalam penelitian ini yang dijadikan fokus masalah adalah pelayanan supervisi pengajaran yang diberikan penilik sekolah dan kepala sekolah kepada guru sekolah dasar dalam usaha meningkatkan kemampuan profesionalnya. Bantuan dan layanan profesional ini akan memberi warna pada kualitas mengajar guru dan hasil belajar siswa di sekolah.

B. Masalah

Pada latar belakang masalah di atas telah dikemukakan bahwa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah pelayanan supervisi pengajaran yang diberikan oleh penilik sekolah dan kepala sekolah kepada guru-guru sekolah dasar dalam usaha meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana efektivitas pelayanan supervisi pengajaran oleh penilik sekolah dan kepala sekolah kepada guru-guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas, perlu dikemukakan definisi operasional istilah efektivitas dan supervisi pengajaran yang tercantum pada rumusan masalah tersebut. Efektivitas dapat dilihat dari aspek produk atau hasil, yaitu pencapaian hasil secara optimum dari suatu kegiatan, dan dapat pula dari aspek proses, yaitu ketepatan atau kesesuaian prosedur dan langkah-langkah atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan supervisi pengajaran, adalah pembinaan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya dalam upaya memperbaiki pengajaran.

Dalam penelitian ini efektivitas supervisi pengajaran, akan dikaji dari aspek proses. Dengan demikian, efektivitas supervisi pengajaran yang dimaksudkan di sini, adalah kesesuaian atau ketepatan langkah-langkah atau kegiatan-pembinaan dan bimbingan Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar guru sebagai upaya memperbaiki pengajaran.

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini, aspek-aspek yang akan diteliti, adalah:

1. Pandangan dan pemahaman Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah tentang peranannya dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Pandangan dan pemahaman Kepala Sekolah tentang peranan Penilik Sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Pandangan dan pemahaman guru tentang peranan Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah

Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

4. Hubungan antara Penilik Sekolah dengan guru dalam kaitannya dengan kegiatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Hubungan Kepala Sekolah dengan guru dalam kaitan dengan pembinaan dan bimbingan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Kegiatan kunjungan dan observasi kelas yang dilakukan Penilik Sekolah dalam kaitannya dengan pelayanan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
7. Kegiatan kunjungan dan observasi kelas yang dilakukan Kepala Sekolah dalam kaitannya dengan pelayanan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
8. Kegiatan pertemuan dan bimbingan yang dilakukan Penilik Sekolah kepada guru dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
9. Kegiatan pertemuan dan bimbingan yang dilakukan Kepala Sekolah kepada guru dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
10. Kegiatan kelompok kerja guru (KKG) sebagai wadah pertemuan dan

diskusi dalam memecahkan masalah-masalah pengajaran yang dihadapi guru dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

11. Kegiatan pertemuan dan diskusi rutin yang diadakan di sekolah setiap hari sabtu dalam usaha mengantisipasi masalah-masalah pengajaran yang muncul dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pelayanan supervisi pengajaran yang diberikan Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah kepada guru-guru Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan. Tujuan secara umum ini dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan gambaran dan pandangan dan pemahaman Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan
- b. Untuk mendapatkan gambaran dan pandangan dan pemahaman Kepala Sekolah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan
- c. Untuk mendapatkan gambaran dan pandangan dan pemahaman guru dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan

Sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

- d. Untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang hubungan antara Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah dengan guru dalam kaitan dengan pemberian pembinaan dan bimbingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
- e. Untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis efektivitas kegiatan kunjungan dan observasi kelas yang dilakukan Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar guru pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
- f. Untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang proses kegiatan pertemuan dan bimbingan Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah kepada guru dalam upaya memecahkan masalah-masalah pengajaran yang muncul dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
- g. Untuk mendapatkan gambaran deskriptif dan menganalisis proses kegiatan KKG sebagai wadah pertemuan dan diskusi guru dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
- h. Untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang proses kegiatan pertemuan dan diskusi rutin yang diadakan di sekolah

setiap hari sabtu dalam mengantisipasi masalah-masalah pengajaran yang muncul dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini dikaji dan dikembangkan makna dan hakekat supervisi pengajaran yang diharapkan ada manfaatnya terhadap pengembangan teori supervisi pengajaran sebagai bagian dari ilmu Administrasi Pendidikan. Manfaat lain penelitian ini, adalah dilihat dari segi metodologis yang digunakan, yaitu pendekatan naturalistik kualitatif yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga bagi peneliti dalam hal bagaimana proses penelitian dilakukan, dan dapat pula melahirkan internalisasi pemahaman, daripada hanya sekedar membaca dan mempelajari teori dari bermacam-macam literatur yang ditulis oleh orang lain.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan terhadap perbaikan sistem pelayanan supervisi pengajaran dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar.

Selain daripada itu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi para administrator pendidikan dalam menentukan kebijaksanaan yang menyangkut bidang supervisi pengajaran.

D. Premis Penelitian

Sebagai landasan, maka dalam penelitian ini dikemukakan beberapa premis, yaitu sebagai berikut:

Premis 1: Pengawasan merupakan fungsi Administrasi Pendidikan untuk menjaga agar pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan administrasi sekolah. Dalam pengawasan ini termasuk bidang garapannya adalah pembinaan profesional guru (supervisi pengajaran) untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah.

Premis 2: Kualitas proses belajar-mengajar (sekolah) sangat ditentukan oleh kemampuan pengetahuan dan keterampilan personil pengelolanya terutama personil gurunya sebagai pelaksana langsung proses belajar-mengajar (PEM) di sekolah.

Premis 3: Peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan personil guru dapat dilakukan penilik sekolah dan kepala sekolah melalui pembinaan profesional (supervisi pengajaran) secara efektif dengan mempergunakan pendekatan dan teknik-teknik supervisi pengajaran tertentu sesuai dengan masalah, kebutuhan, dan kondisi guru.

Premis 4: Supervisi pengajaran yang efektif, mendorong pertumbuhan profesional guru. Hal ini dapat melalui kepemimpinan partisipatif yang memberikan kesempatan kepada guru berinisiatif dan berkreasi sebagai upaya mengembangkan bakat, minat, dan potensi-potensi lain yang dimiliki guru.

Premis 5: Supervisi pengajaran yang efektif dapat membantu guru memperoleh arah diri, memahami masalah-masalah yang dihadapi dan dialami sehari-hari, belajar memecahkan masalah dengan kemampuan imajinasi dan kreativitas sendiri. Dalam suasana seperti itu, pemikiran, alternatif pemecahan masalah dan gagasan inovatif akan muncul dari guru tanpa menunggu intruksi dari atasan.

Premis 6: Efektivitas pelayanan supervisi pengajaran dapat dilihat dan didekati dari aspek proses dan produk dari pelaksanaan supervisi pengajaran. Kedua aspek ini harus dikaitkan secara langsung dalam upaya mewujudkan tujuan supervisi pengajaran, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar-mengajar di sekolah.

Premis-premis yang dikemukakan di atas, merupakan pedoman dalam mengajukan pertanyaan dalam proses pengumpulan data. Sehubungan hal tersebut, dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan supervisi pengajaran yang dilakukan Penilik Sekolah dan Kepala Sekolah.

1. Pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan supervisi pengajaran oleh Penilik Sekolah, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan dan pemahaman Penilik Sekolah tentang peranannya dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
- b. Bagaimana pandangan dan pemahaman Kepala Sekolah dan guru tentang peranan Penilik Sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
- c. Bagaimana sifat hubungan antara Penilik Sekolah dengan guru dalam kaitan dengan pemberian pembinaan dan bimbingan dalam rangka perbaikan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
- d. Bagaimana efektivitas kegiatan kunjungan sekolah dan observasi kelas yang dilakukan Penilik Sekolah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar guru pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
- e. Bagaimana proses kegiatan pertemuan dan bimbingan yang dilakukan Penilik Sekolah kepada guru dalam memecahkan masalah-masalah pengajaran yang muncul dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
- f. Bagaimana proses kegiatan KKG sebagai wadah pertemuan dan diskusi guru dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?

2. Pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan supervisi pengajaran oleh Kepala Sekolah, adalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pandangan dan pemahaman Kepala Sekolah tentang peranannya dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
 - b. Bagaimana pandangan dan pemahaman guru tentang peranan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
 - c. Bagaimana sifat hubungan antara Kepala Sekolah dengan guru dalam kaitan dengan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka perbaikan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
 - d. Bagaimana efektivitas kegiatan kunjungan dan observasi kelas yang dilakukan Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar guru pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
 - e. Bagaimana proses kegiatan pertemuan dan bimbingan yang dilakukan Kepala Sekolah kepada guru dalam memecahkan masalah-masalah pengajaran yang muncul dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?
 - f. Bagaimana proses kegiatan pertemuan dan diskusi rutin yang diadakan setiap hari sabtu di sekolah pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan?